

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### A. Mahkamah Agung

##### **Mahkamah Agung Republik Indonesia** (disingkat **MA RI** atau **MA**)

adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.<sup>15</sup>

#### 1. Sejarah Mahkamah Agung

Masa penjajahan Belanda atas bumi pertiwi Indonesia, selain mempengaruhi roda pemerintahan juga sangat besar pengaruhnya terhadap Peradilan di Indonesia. Dari masa dijajah oleh Belanda (Mr. Herman Willem Daendels – Tahun 1807), kemudian oleh Inggris (Mr. Thomas Stanford Raffles – Tahun 1811 Letnan Jenderal) dan masa kembalinya Pemerintahan Hindia Belanda (1816-1842).

Pada masa penjajahan Belanda Hoogerechtshoof merupakan Pengadilan Tertinggi dan berkedudukan di Jakarta dengan wilayah Hukum meliputi seluruh Indonesia. Hoogerechtshoof beranggotakan seorang Ketua, 2 orang anggota, seorang pokrol Jenderal, 2 orang Advokat Jenderal dan seorang Panitera dimana perlu dibantu seorang Panitera Muda atau lebih. Jika

<sup>15</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Agung\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu Gubernur Jenderal dapat menambah susunan Hoogerechtshoof dengan seorang Wakil dan seorang atau lebih anggota.

Setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno melantik/mengangkat Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama. Hari pengangkatan itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Mahkamah Agung, melalui Surat Keputusan KMA/043/SK/VIII/1999 tentang Penetapan Hari Jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tanggal 19 Agustus 1945 juga merupakan tanggal disahkannya UUD 1945 beserta pembentukan dan pengangkatan Kabinet Presidentil Pertama di Indonesia. Mahkamah Agung terus mengalami dinamika sesuai dinamika ketatanegaraan. Antara tahun 1946 sampai dengan 1950 Mahkamah Agung pindah ke Yogyakarta sebagai ibukota Republik Indonesia. Pada saat itu terdapat dua Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia yaitu<sup>16</sup> :

1. Hoogerechtshof di Jakarta dengan :
  - a. Ketua : Dr. Mr. Wirjers
  - b. Anggota Indonesia :
    - 1) Mr. Notosubagio,
    - 2) Koesnoen
  - c. Anggota belanda :
    - 1) Mr. Peter,
    - 2) Mr. Bruins
  - d. Procureur General : Mr. Urip Kartodirdjo

<sup>16</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Agung\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mahkamah Agung Republik Indonesia di Yogyakarta dengan :

- a. Ketua : Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja
- b. Wakil : Mr. R. Satochid Kartanegara
- c. Anggota :
  1. Mr. Husen Tirtaamidjaja,
  2. Mr. Wirjono Prodjodikoro,
  3. Sutan Kali Malikul Adil
- d. Panitera : Mr. Soebekti
- e. Kepala TU : Ranuatmadja

Kemudian terjadi kapitulasi Jepang, yang merupakan Badan Tertinggi disebut Saikoo Hooiin yang kemudian dihapus dengan Osamu Seirei (Undang-Undang No. 2 Tahun 1944). Pada tanggal 1 Januari 1950 Mahkamah Agung kembali ke Jakarta dan mengambil alih (mengoper) gedung dan personil serta pekerjaan Hoogerechtschof. Dengan demikian maka para anggota Hoogerechtschof dan Procureur General meletakkan jabatan masing-masing dan pekerjaannya diteruskan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat (MA-RIS) dengan susunan :

1. Ketua : Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja
2. Wakil : Mr. Satochid Kartanegara
3. Anggota :
  1. Mr. Husen Tirtaamidjaja,
  2. Mr. Wirjono Prodjodikoro,
  3. Sutan Kali Malikul Adil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Panitera : Mr. Soebekti

5. Jaksa Agung : Mr. Tirtawinata

Dapat dikatakan sejak diangkatnya Mr. Dr. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung, secara operasional pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di bidang Pengadilan Negara Tertinggi adalah sejak disahkannya Kekuasaan dan Hukum Acara Mahkamah Agung yang ditetapkan tanggal 9 Mei 1950 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam kurun waktu tersebut Mahkamah Agung telah dua kali melantik dan mengambil sumpah Presiden Soekarno, yaitu tanggal 19 Agustus 1945 sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia dan tanggal 27 Desember 1945 sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS).

Waktu terus berjalan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 sudah harus diganti, maka pada tanggal 17 Desember 1970 lahirlah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dalam arti Mahkamah Agung sebagai Badan Pengadilan Kasasi (terakhir) bagi putusanputusan yang berasal dari Pengadilan di bawahnya, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang meliputi 4 (empat) Lingkungan Peradilan :

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan TUN



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## **2. Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Agung**

Sejak Tahun 1970 tersebut kedudukan Mahkamah Agung mulai kuat dan terlebih dengan keluarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka kedudukan Mahkamah Agung sudah mulai mapan, dalam menjalankan tugas-tugasnya yang mempunyai 5 fungsi, yaitu:

- a. Fungsi Peradilan
- b. Fungsi Pengawasan
- c. Fungsi Pengaturan
- d. Fungsi Memberi Nasihat
- e. Fungsi Administrasi

Gedung Mahkamah Agung pada tahun 1980 (sekarang menjadi milik Kementerian Keuangan) semakin berkembang dan kebutuhan baik teknis maupun nonteknis semakin meningkat, Mahkamah Agung harus bisa mengatur organisasi, administrasi dan keuangan sendiri tidak bergabung dengan Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM). Waktu terus berjalan, gagasan agar badan Kehakiman sepenuhnya ditempatkan di bawah pengorganisasian Mahkamah Agung terpisah dari Kementerian Kehakiman.

Pada Mei 1998 di Indonesia terjadi perubahan politik yang radikal dikenal dengan lahirnya Era Reformasi. Konsep Peradilan Satu Atap dapat diterima yang ditandai dengan lahirnya TAP MPR No.X/MPR/1998 yang menentukan Kekuasaan Kehakiman bebas dan terpisah dari Kekuasaan Eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan diundangkannya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang tersebut memberi batas waktu lima tahun untuk pengalihannya sebagaimana tertuang dalam Pasal II ayat (1) yang berbunyi :

Berawal dari Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 inilah kemudian konsep Satu Atap dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pada tanggal 23 Maret 2004 lahirlah Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung, yang ditindaklanjuti dengan :

1. Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Departemen Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.
2. Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lingkungan Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung yang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2004.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Agung\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **B. Komisi Yudisial**

**Komisi Yudisial Republik Indonesia** atau cukup disebut **Komisi Yudisial** (disingkat **KY RI** atau **KY**) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial bertanggungjawab kepada publik melalui DPR, dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat<sup>18</sup>.

### **1. Definisi Komisi Yudisial**

Komisi yudisial adalah salah satu lembaga yang diatur dan dibentuk UUD NRI 1945, keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisis Yudisial Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.” Sedangkan pada Pasal 2 dijelaskan bahwa: “Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya”.

<sup>18</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Yudisial\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Yudisial_Republik_Indonesia)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Eksistensi konstitusional Komisi Yudisial tetap utuh sebagaimana diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945: “Komisi Yudisial merupakan lembaga yang bersifat mandiri, yang mana berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga (mengawasi) dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”<sup>19</sup>

Mengenai kedudukan Komisi Yudisial, terdapat beberapa perspektif. Ada yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga tinggi negara karena Komisi Yudisial diatur dan dibentuk oleh UUD NRI 1945.

Kemudian ada yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial state auxiliary organ (lembaga negara bantu) karena merupakan lembaga yang menunjang lembaga kekuasaan hakim, Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR, dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.

## **2. Status/Kedudukan Komisi Yudisial**

Kedudukan Komisi Yudisial diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang berbunyi:

Pasal 1 butir ke-1 : Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945

Pasal 2 ayat (1) : Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat

---

<sup>19</sup>UUD 1945 Pasal 24B Ayat (1)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mandiri dan dalam pengawasannya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya

Kemandirian Komisi Yudisial juga dijelaskan dalam UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya dalam pasal 24B. Dalam Undang undang Dasar 1945 Pasal 24B disebutkan :

Pasal 24B ayat (1) : Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,serta perilaku hakim.

Pasal 24B ayat (3) : Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR

Pasal 24B ayat (4) : Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur oleh UndangUndang

Kedudukan Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Dasar 1945 disamakan dengan lembaga-lembaga lain yangdiatur juga dalam Undang-Undang Dasar 1945. Komisi ini ditentukan dan diatur tersendiri oleh UUD 1945, karena dianggap mempunyai kedudukan dan posisi yang penting dalam upaya menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat dan perlaku hakim.

### 3. Sejarah Komisi Yudisial

Komisi Yudisial merupakan respon dari tuntutan reformasi yang bergulir tahun 1998. Saat itu, salah satu dari enam agenda reformasi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diusung adalah penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tuntutan tersebut merupakan wujud kekecewaan rakyat terhadap praktik penyelenggaraan negara sebelumnya yang dihiasi berbagai penyimpangan, termasuk dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Sejarah Komisi Yudisial dimulai pada 9 November 2001, saat sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI mengesahkan amendemen ketiga UUD 1945. Dalam sidang itulah Komisi Yudisial resmi menjadi salah satu lembaga negara yang diatur secara khusus dalam konstitusi/dasar negara dalam Pasal 24B UUD 1945.

Beberapa agenda kebijakan mulai digagas, seperti pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif dan pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparat penegak hukum. Untuk merealisasikan hal tersebut, terdapat perubahan penting dalam tubuh kekuasaan kehakiman melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Salah satu pokok perubahan yang mendasar ialah penempatan tiga aspek organisasi, administratif, dan finansial kekuasaan kehakiman menjadi satu atap di Mahkamah Agung. Sebelumnya, secara administratif ada di bawah kendali Departemen Kehakiman. Sedangkan secara teknis yudisial, berada dalam kekuasaan Mahkamah Agung. Konsep ini lebih dikenal dengan sebutan penyatuatapan kekuasaan kehakiman (*one roof of justice system*).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehadiran sistem tersebut bukan tanpa kekhawatiran. Menyadur naskah akademis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, penyatuatapan –tanpa perubahan sistem lainnya misalnya rekrutmen, mutasi, promosi, dan pengawasan terhadap hakim– berpotensi melahirkan monopoli kekuasaan kehakiman.

Selain itu, ada pula kekhawatiran Mahkamah Agung belum mampu menjalankan tugas barunya karena memiliki beberapa kelemahan organisasi yang sampai saat ini masih dalam upaya perbaikan. Alasan lain ialah gagalnya sistem yang ada untuk menciptakan pengadilan yang lebih baik. Sehingga penyatuatapan kekuasaan kehakiman ke Mahkamah Agung belum menyelesaikan permasalahan secara tuntas.

Pertimbangan itu membuat ahli dan pengamat hukum mengeluarkan ide untuk membentuk lembaga pengawas eksternal yang diberi tugas menjalankan fungsi checks and balances. Kehadiran lembaga pengawas peradilan diharapkan agar kinerja pengadilan transparan, akuntabel dan imparial, serta mengedepankan aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

#### **4. Komisi Yudisial Dalam Struktur Ketatanegaraan RI**

Sebelum membahas kedudukan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, sebaiknya kita tinjau dulu apa yang dimaksud dengan sistem ketatanegaraan, sistem ketatanegaraan adalah hubungan timbal balik antara lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-undang Dasar, dengan demikian untuk melihat bagaimana sistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketatanegaraan di suatu negara maka harus mengetahui lembaga-lembaga negara apa saja yang diatur dalam Undang-undang Dasar.

Di Indonesia selain lembaga negara yang diatur dalam UUD 1947 dan juga lembaga-lembaga negara yang diatur di luar UUD 1945 yakni dalam Undang-undang dan keputusan Presiden. Dalam konteks tersebut, T. Soemantri M berupaya menjelaskan pengertian sistem ketatanegaraan dalam arti luas dan sempit, dalam hal lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam UUD, UU dan Keputusan Presiden berhubungan secara timbal balik maka hubungan tersebut dilihat sebagai sistem ketatanegaraan dalam arti yang luas, dengan demikian dapat dibedakan mana sistem ketatanegaraan dalam arti sempit dan mana sistem ketatanegaraan dalam arti luas.

Berdasarkan pendapat T. Soemantri M, telah diuraikan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dikenal sistem ketatanegaraan dalam arti sempit dan dalam arti luas dengan melihat hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan wilayah pengaturan masing-masing lembaga apakah dalam UUD, UU, atau Keputusan Presiden. Oleh sebab itu terkait topik kedudukan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan maka fokus diarahkan pada sistem ketatanegaraan dalam arti sempit, karena keberadaan Komisi Yudisial untuk pertama kali diatur dalam Pasal 24B amandemen ketiga UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 24B ayat (1) : Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Sementara itu, pendapat yang dikemukakan oleh Moch. Mahfud. MD, menyatakan.<sup>20</sup> “Harus diingat hukum tatanegara itu bukanlah apa yang ada didalam teori atau berlaku di negara lain, hukum tatanegara adalah apa yang digagas kemudian ditulis dalam konstitusi oleh bangsa suatu negara. Jadi hukum tata negara adalah apa yang diperdebatkan dan ditulis sebagai pilihan politik didalam konstitusi, bukan apa yang di dalam teori atau yang berlaku di negara lain betapapun dianggap mapan.”

Menurut Pasal 24B ayat (1) Amandemen UUD 1945 Komisi Yudisial memiliki dua wewenang, pertama mengusulkan pengangkatan hakim agung dan kedua wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dari ketentuan ini bagaimana status Komisi Yudisial apakah sebagai lembaga permanen atau hanya sekedar lembaga penunjang atau auxiliary organ? Komisi Negara sering disebut dengan istilah berbeda ada yang disebut dengan auxiliary organ, auxiliary bodies supporting organ.

Jika dilihat wewenang Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim Agung maka Komisi Yudisial merupakan lembaga yang memberikan pelayanan atau auxiliary organ sedangkan pada

<sup>20</sup> Moh. Mahfud MD, “Komisi Yudisial Dalam Mosaik Ketatanegaraan Kita”, dalam *Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Komisi Yuddisial Tahun 2007*, h. 10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial adalah lembaga negara utama. Dengan demikian menurut T. Soemantri M, Komisi Yudisial mempunyai dua status lembaga negara yakni sebagai lembaga negara yang memberikan pelayanan lembaga negara utama dan lembaga negara yang memiliki wewenang mandiri.

Terkait dengan yudicial review Undang-undang Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dalam amar pertimbangannya menjelaskan bahwa Komisi Yudisial adalah auxiliary organ atau lembaga negara penunjang. Sebab Komisi Yudisial bukan pemegang kekuasaan kehakiman oleh karena itu Komisi Yudisial tidak bisa dijadikan organ yang menjalankan peran checks and balances. Dengan Mahkamah Agung maupun dengan Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan Komisi Yudisial dalam Bab IX tentang kekuasaan kehakiman dalam sisitem ketatanegaraan juga diuraikan oleh Denny Indrayana yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial diatur dalam bab yang sama tentang kekuasaan kehakiman mestinya dengan kewenangan menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim tidaklah bisa diargumentasikan Komisi Yudisial hanya sebagai lembaga penunjang dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi lebih utama, Komisi Yudisial kewajibannya berfungsi sejajar dengan lembaga yang diawasi”.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Jimly Asshidiqie secara struktural kedudukan Komisi Yudisial diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi secara fungsional peranannya bersifat penunjang (auxiliary) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial meskipun kekuasaannya terkait dengan kedudukan kekuasaan kehakiman, tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum (code of law), melainkan lembaga penegak norma etik (code of etik), lagi pula Komisi ini hanya berurusan dengan soal kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional.

Berdasarkan uraian para ahli tata negara di atas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai kedudukan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan RI, pertama membuat amandemen UUD 1945 menghendaki agar Komisi Yudisial ditetapkan dalam Bab IX tentang kekuasaan kehakiman tentunya berdasarkan suasana kebatinan yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis dan politis ketika itu sehingga melahirkan fakta yuridis mengenai muatan Pasal 24B UUD 1945 tentang Komisi Yudisial. Kedua pengaturan Komisi Yudisial dalam konstitusi menunjukkan bahwa Komisi Yudisial merupakan main organ atau lembaga negara utama seperti lembaga negara utama lainnya yang ada dalam konstitusi argumen ini didasarkan pada kewenangan yang diatur dalam amandemen UUD 1945 terkait dengan fungsi pengawasan eksternal

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap hakim, disamping itu amandemen UUD 1945 sendiri tak pernah menjelaskan bahwa Komisi Yudisial adalah auxiliary organ tetapi justru menguatkan kedudukan Komisi Yudisial sebagai main organ dengan sifatnya yang mandiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 24B ayat (1).

Namun seperti dikemukakan di atas, terlepas dari benar atau salah, suka atau tidak suka, putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat yang karenanya harus diterima dan dilaksanakan, sehingga oleh karena itu secara struktural Komisi Yudisial sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun secara fungsional peranannya bersifat penunjang (auxiliary) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, mengingat Komisi Yudisial bukan sebagai pelaksana utama kekuasaan kehakiman, melainkan lembaga penegak norma etik (code of ethic).

## **5. Gagasan Pembentukan Penegak Etik Hakim**

Pembentukan lembaga pengawas peradilan sebenarnya sempat digagas sebelum terbentuknya Komisi Yudisial. Misalnya, ada wacana pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH).

MPPH yang telah diwacanakan sejak tahun 1968, berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan/atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Sayangnya, ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhasil menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sementara Dewan Kehormatan Hakim (DKH) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim, serta menyusun kode etik (code of conduct) bagi para hakim.

Barulah ide pembentukan Komisi Yudisial mulai terealisasi pada tahun 1999, setelah Presiden B.J. Habibie membentuk panel diskusi mengkaji pembaharuan UUD 1945. Istilah Komisi Yudisial sendiri dikemukakan oleh Hakim Agung Iskandar Kamil. Ia ingin agar kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim terjaga. Kemudiannya Komisi Yudisial secara eksplisit mulai disebut saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004. Maka, secara resmi nama Komisi Yudisial tercantum dalam Pasal 24B UUD 1945 yang merupakan hasil amendemen ketiga.

Berdasarkan Pasal 24B Ayat 1 UUD 1945, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kemudian pada 13 Agustus 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disahkan. Implementasi dari undang-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang tersebut, pemerintah membentuk panitia seleksi untuk mengisi organ Komisi Yudisial dengan memilih tujuh orang yang ditetapkan sebagai Anggota Komisi Yudisial.

## 6. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 1) Pasal 24A ayat (3): Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
  - 2) Pasal 24B:
    - a) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
    - b) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
    - c) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
    - d) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim.
- e. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- f. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- g. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- h. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Makhamah\\_Agung\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Makhamah_Agung_Republik_Indonesia)